

Laporan Kinerja

Laporan kinerja salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DKP Aceh

LKj
2020



Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Jl. Sisingamangaraja Ujung Komplek PPS Kutaraja

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

AN ACEH



Ayo Hidup Sehat
TANPA NARKOBA
Satukan Tangan, Satukan Hati
Untuk Aceh Hebat Tanpa Narkoba

KATA PENGANTAR



Fokus agenda kerja Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 yaitu “Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Belanja pemerintah diefektifkan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh yaitu pengembangan kawasan strategis, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung hal tersebut, DKP Aceh telah melaksanakan berbagai program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2020. Pencapaian Program diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas. Guna memastikan target IKU tercapai, DKP Aceh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai bentuk peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Seluruh kebijakan yang dilaksanakan tahun 2020 merupakan penjabaran dari 2 misi gubernur Aceh, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 5 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2020 termasuk capaian target beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2020, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, keras jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh, Februari 2021
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



ALIMAN, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan	02
1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh	02
1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh	04
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh	06
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	09
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	16
2.3. Penetapan Kinerja	17
2.4. Program Instansi	18
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja	24
3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh	49
BAB 4. PENUTUP	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

1.1. Rincian ASN dan Tenaga Kontrak DKP Aceh Berdasarkan Jabatan -----	04
1.2. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan -----	05
1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan -----	06
2.1. Visi dan Misi Pemerintahan Aceh, Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan --	14
2.2. Perjanjian Kinerja DKP Aceh Tahun 2020-----	17
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama DKP Aceh Tahun 2020 -----	22
3.2. Perkembangan Capaian NTN Tahun 2018-2020 -----	26
3.3. Perkembangan Capaian NTPi Tahun 2018-2020 -----	28
3.4. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018-2020 -----	30
3.5. Capaian Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan Tahun 2018-2020 ----	33
3.6. Capaian Produksi Perikanan 2018-2020 -----	34
3.7. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2020 (Ton) -----	36
3.8. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2019 Menurut Komoditas Utama (Ton) -----	37
3.9. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2020 (Ton) -----	38
3.10. Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020 Menurut Komoditas Utama (Ton) -----	39
3.11. Capaian Produksi Garam Tahun 2018-2020 (Ton) -----	41
3.12. Produksi Garam (Ton) Per Kabupaten Sentra Garam Aceh -----	42
3.13. Capaian Nilai Ekspor Perikanan Aceh Tahun 2020 -----	44
3.14. Capaian Luas Kawasan Konservasi (Ha) -----	46
3.15. Luas Kawasan Konservasi (Ha) -----	46
3.16. Proporsi Tangkapan Ikan Selama 2017-2020 Terhadap MSY (%) -----	48
3.17. Capaian Rasio Luas Kawasan Terhadap Perairan Teritorial (%) -----	49
3.18. Capaian Nilai Kinerja Anggaran DKP Aceh Tahun 2020 -----	50

DAFTAR GAMBAR

3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2017-2020 -----	26
3.2. Peningkatan Sarpras Pelabuhan dan Bantuan Alat Tangkap Tahun 2020	27
3.3. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Selama Tahun 2018-2020	28
3.4. Bantuan Bioflok, Benih Dan Pakan Pada Program Budidaya Tahun 2020	26
3.5. Kegiatan Gemarikan dalam Meningkatkan Konsumsi Ikan di Aceh -----	32
3.6. Trend Nilai PDRB Perikanan ADHK Tahun 2016-2020 (Rp.milyar) -----	33
3.7. Perkembangan Produksi Perikanan Selama Tahun 2016-2020 -----	35
3.8. Pelaksanaan Integrasi Lahan Garam di Tahun 2020 -----	43
3.9. Grafik Pagu, Realisasi dan Sarapan Anggaran APBA DKP Aceh Tahun 2016-2020 -----	50
3.10. Realisasi APBA DKP Aceh Tahun 2020 Per Jenis Belanja -----	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	56
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	57
3. Penghargaan Tahun 2020	58

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Qanun Aceh No 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2020, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa indikator Kinerja utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2020 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2020 sebesar 98,32%.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dari 8 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2020, terdapat 3 IKU yang pencapaiannya melebihi target dan 5 IKU yang belum dapat mencapai target.
2. IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: 1). Konsumsi ikan, 2). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh, 3). Nilai ekspor perikanan.

3. 4 IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: 1). Nilai tukar nelayan, 2) Nilai tukar pembudidaya ikan, 3). Produksi perikanan, 4). Produksi garam, dan 5). Luas kawasan konservasi perairan.

Kinerja keuangan DKP Aceh tahun 2020 dilaksanakan melalui pelaksanaan 11 program dalam APBA DKP Aceh Tahun 2020. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPA Awal terbit sebesar Rp. 296,8 milyar dan terdapat pengurangan/refocusing sebesar Rp. 164,8 milyar menjadi 132,0 milyar pada DPA perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasi sebesar 87,40%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan DKP Aceh tahun 2020 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Aceh.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2020 terdapat 7 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, DKP Aceh melaksanakan 11 (sebelas) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 8 Unit Kerja Eselon III di lingkup DKP Aceh.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja DKP Aceh tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DKP Aceh. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja DKP Aceh Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran DKP Aceh selama tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugas DKP Aceh adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DKP Aceh menyelenggarakan fungsinya :

- A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- B. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- C. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- D. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- E. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- F. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- G. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- H. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- I. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- J. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- K. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;

- L. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- M. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- N. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- O. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- P. Pembinaan UPTD; dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh

Susunan kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh hingga tahun 2020 sebanyak 337 orang yang terdiri dari 34 orang pejabat struktural dengan persentase 10,09%, 197 orang staf PNS dengan persentase 58,45%, 1 orang pejabat fungsional 0,30%, dan 105 orang staf tenaga kontrak dengan persentase 31,16%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut.

TABEL 1.1. RINCIAN ASN DAN TENAGA KONTRAK DKP ACEH BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	34	10,09%
2.	Staf PNS	197	58,45%
3.	Fungsional	1	0,30%
4.	Staf Tenaga Kontrak	105	31,16%
	Jumlah	337	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2020

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebanyak 237 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 154 orang, golongan II sebanyak 61 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang . Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut.

TABEL 1.2. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	24	10,34%
III	163	50,46%
II	41	17,67%
I	4	1,72%
Jumlah	232	100

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, secara persentase terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar berada pada golongan III sebesar 50,46%, golongan II sebesar 17,67%, golongan IV sebesar 10,34%, dan yang paling rendah golongan I sebesar 1,72%. Pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan pada sumber daya manusia penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan berintegrasi. Persentase strata pendidikan pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang terbanyak pada jenjang S1 sebesar 56,03%, dan yang paling sedikit adalah persentase jenjang SD sebesar 0,43%. Persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu ditingkatkan lagi untuk menghasilkan Sumber daya manusia yang berkualitas. Rincian jumlah dan persentase pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.3. berikut.

TABEL 1.3. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	2	0,86%
S2	46	19,83%
S1	130	56,03%
D4	3	1,29
D3	4	1,72%
SLTA	43	18,53%
SMP	3	1,29%
SD	1	0,43%
Jumlah	232	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2019

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh

A. Potensi

Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km dan luas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km². Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksplorasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Aceh diperkirakan sebesar 272,7 ribu ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah aceh dan perairan (ZEE). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut baru dimanfaatkan sebesar 208 ribu ton pada tahun 2017 atau baru 76%. Komoditas unggulan yang banyak terdapat di perairan Aceh adalah jenis ikan pelagis besar dan kecil seperti

tuna, tongkol, cakalang, tenggiri, kembung, layang, siro, dan tembang; ikan demersal seperti kurisi, bawal putih, gulamah, kuro dan udang; ikan karang seperti kerapu, ekor kuning dan ikan kakap; lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi juga menghiasi sepanjang perairan Aceh. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Perairan laut Aceh juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Aceh yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Selain itu, Aceh juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, mencapai 55.896 ha (tidak termasuk potensi budidaya laut) yang terdiri dari budidaya payau 50.691,70 ha, dan budidaya air tawar 5.204,3 ha (Aceh Dalam Angka 2016). Pada tahun 2017, produktifitas perikanan budidaya di provinsi Aceh masih sangat rendah. Dimana produktifitas perikanan budidaya payau (tambak) hanya sebesar 0,74 ton/ha, dan produktifitas perikanan budidaya air tawar hanya 0,67 ton/ha untuk media sawah dan 5,40 ton/ha untuk media kolam.

Potensi rumput laut di Aceh sebenarnya sangat besar. Namun sayang, umumnya rumput laut masih dipandang sebagai tumbuhan liar. tumbuhan algae laut berkualitas unggul tumbuh subur secara liar dan di beberapa wilayah pantai daratan dan kepulauan di Aceh. Apalagi rumput laut sedang booming di pasar internasional, praktis berpeluang besar dan jadi salah satu sektor usaha baru untuk menjawab carut-marutnya perkenomian masyarakat pesisir. Padahal pasar ekspornya cukup besar. Melihat tampilan teluk Pulau Simeulue dan Pulo Aceh, sangat cocok dijadikan daerah budidaya rumput laut, karena berada di laut lepas dengan pantai yang relatif bersih. Bahkan terdapat

satu jenis rumput laut yang termasuk langka, yaitu di Lhok Bubon (Aceh Barat). Masyarakat setempat menyebutnya dengan lada laot karena buahnya seperti lada. Pengelolaan dan pemasaran rumput laut ini masih tradisional.

B. Permasalahan

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Aceh yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Beberapa wilayah perairan laut Aceh sering terjadi praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Aceh (WPP 571 dan WPP 572), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh belum memadai.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi)implementasi cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan

mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien. Selain itu masih terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai daerah yang memiliki panjang pantai 2.666,27 Km, sudah seharusnya kebutuhan garam daerah dapat dipenuhi dari produksi. Saat ini produksi garam daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana serta masih tingginya biaya logistik. Industri pengolahan ikan, masih membutuhkan bahan baku dengan jenis ikan yang spesifik dan standar kualitas tertentu, serta suplai yang kontinyu. Faktor utama yang menyebabkan utilisasi industri pengolahan ikan rendah adalah suplai bahan baku ikan yang kurang. Saat ini distribusi stok ikan tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan di mana sebagian besar bahan baku ikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, perlu didorong regulasi terkait penangkapan ikan untuk bahan baku industri dan regulasi untuk mendorong sistem logistik ikan yang efisien.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DKP Aceh Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

- B. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis DKP Aceh 2017-2022 dan perjanjian kinerja tahun 2019;
- C. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan DKP Aceh tahun 2020;
- D. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja DKP Aceh dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 memberi mandat bahwa arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, memuat visi dan misi Gubernur Aceh yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh, visi pembangunan diarahkan untuk ***“Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil Dan Melayani”***. Visi tersebut dilakukan dengan pelaksanaan 2 misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; dan Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan pada tema tahun 2020 adalah ***“Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”*** sehingga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan visi, misi Pemerintah Aceh, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam mensukseskan visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dan dibatasi oleh ruang waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan tersebut harus merefleksikan bagaimana visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat terealisasi dengan baik. Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu :

1. Menurunnya angka kemiskinan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 – 2022. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2022) yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan;
4. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan;
5. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

C. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mencapai sasaran, strategi juga dapat dijadikan

sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi yang yang dicanangkan yaitu :

1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan;
2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;
3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan;
4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik;
5. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan;
7. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
8. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
9. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
10. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan;
11. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir;
12. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
13. Memberantas pelanggaran IUU Fishing;
14. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

D. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Terdapat 10 (sepuluh) misi pemerintah Aceh yang telah dirumuskan, dan 2 (dua) diantaranya selaras dengan program-program unggulan yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam arah kebijakan. Adapun arah kebijakan tersebut yaitu :

1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;

4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan;
5. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan;
6. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan;
7. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan;
8. Membangun kawasan unggulan perikanan;
9. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran;
10. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;
11. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
12. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
13. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
14. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

TABEL 2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAHAN ACEH, TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIAJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI			
MISI 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan 2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan 2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan 4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan 3. Penguatan kapasitas budidaya perikanan 4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok 5. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran 6. Peningkatan pengelolaan sumberdaya ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan 2. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan 3. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan 4. Membangun kawasan unggulan perikanan 5. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran 6. Meningkatkan pengelolaan

			sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
MISI 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	1. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir 2. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan 3. Memberantas pelanggaran IUU Fishing 4. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, maka Dinas kelautan dan Perikanan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi);
3. Konsumsi ikan;
4. Produksi perikanan;
5. Produksi Garam;
6. Nilai Ekspor Perikanan;

7. Luas kawasan konservasi perairan.

2.3. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja DKP Aceh tahun 2020, secara rinci sebagai berikut:

TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA DKP ACEH TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	101,25 99,50
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	55,28
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,13
4.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	5. Produksi Perikanan (ton) a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 6. Produksi Garam (ton)	332.608,15 214.350,10 118.258,05 25.542,32
5.	Meningkatkan neraca perdagangan	7. Nilai Ekspor Perikanan (US\$)	1.357.000□
6.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	8. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	280.000,00

2.4. Program Instansi

Untuk mencapai kinerja DKP Aceh tahun 2020 tersebut, rencana kerja dilakukan melalui 11 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran

Program ini bertujuan terlaksananya penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sasarannya untuk mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk pengendalian kedisiplinan aparatur sipil dalam pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian disiplin aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja aparatur dalam pengendalian akuntabilitas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian kinerja aparatur melalui peningkatan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis.

E. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pengembangan Perbenihan Perikanan, Pembinaan dan Pembudidayaan ikan, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Tawar, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Payau, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Laut.

F. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pembinaan kelembagaan dan SDM nelayan, pengadaan armada kapal perikanan, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dan Penyedia sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

G. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan baik pasar domestik maupun internasional dan menjamin akan keamanan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan. Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan.

H. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan di pulau pulau kecil melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembinaan kluster garam dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.

I. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan dan Peningkatan efisiensi sistem logistik perikanan Aceh.

J. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga kelestarian dan pengawasan lingkungan dari perusakan yang tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan kawasan konservasi secara lestari dengan sasaran peningkatan

kawasan konservasi perairan. Selain itu, sasarannya adalah Perairan Aceh bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan, Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing, Pengelolaan pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil dan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

K. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi

Tujuan program adalah meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial perencanaan bidang kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran.

Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan DKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Capaian penilaian Sasaran Strategis DKP tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DKP ACEH TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,25	97,48	96,28
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	99,50	95,24	95,72
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	55,28	59,32	107,31
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,13	5,25**	102,34

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi perikanan (ton)	332.608,15	319.648,46 *	96,10
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	214.350,10	211.266,13 *	98,58
		Produksi perikanan Budidaya (ton)	118.258,05	108.382,33 *	91,65
		Produksi garam (ton)	25.542,32	19.187,58 *	75,12
5	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.357.000,00	1.837.400,00**	135,40
6	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	280.000,00	161.772,35 *	57,78

Keterangan : * angka semetara ** angka sangat sementara

Capaian kinerja secara pada tahun 2020 telah menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 Sasaran Strategis (SS) terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 7 indikator tersebut terdapat 3 yang capaiannya $\geq 100\%$ (bernotifikasi hijau), yaitu konsumsi ikan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh dan nilai ekspor perikanan. Untuk indikator kinerja utama yang tidak tercapai di tahun 2020 (bernotifikas kuning) sebanyak 3 indikator antara lain : nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, produksi perikanan dan 2 indikator yang masih bernotifikasi merah yaitu produksi garam dan Luas kawasan konservasi perairan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas yang mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah

tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya ditahun 2020, maka capaian Nilai Tukar di bawah angka 100 dan tidak mencapai target tahun 2020, sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2020, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

IKU 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 101,87, tahun 2019 sebesar 101,90 dan tahun 2020 sebesar 97,48 atau mencapai 96,28% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar 101,25.

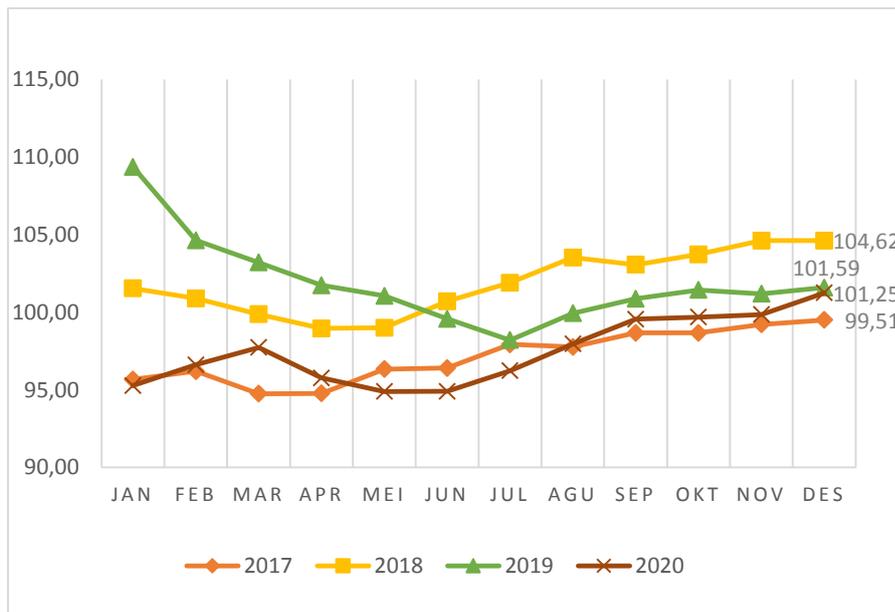
TABEL 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
101,87	101,90	101,25	97,48	96,28	-1,41	106,00	91,96

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Pertumbuhan realisasi NTN selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1,41 persen dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 91,96 persen.

GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) PER BULAN SELAMA TAHUN 2017-2020



Selama tahun 2020, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2020 dengan nilai mencapai 101,25. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks

pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 94,90 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama empat tahun terakhir (2017 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,1%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3%, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar

0,3%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2022 sebesar 106, posisi capaian tahun 2020 sudah mencapai 91,96%.

Penyebab tidak tercapainya target NTN tahun 2020 dikarekan efek pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKP Aceh untuk meningkatkan NTN sebesar 106 pada tahun 2022 yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi seperti PPS Kutaraja, PPN Idi dan PPP Labuhan Haji. Selain itu, juga diberikan bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpom laut dalam, jaring dan GPS, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

GAMBAR 3.2. PENINGKATAN SARPRAS PELABUHAN DAN BANTUAN ALAT TANGKAP TAHUN 2020



IKU 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

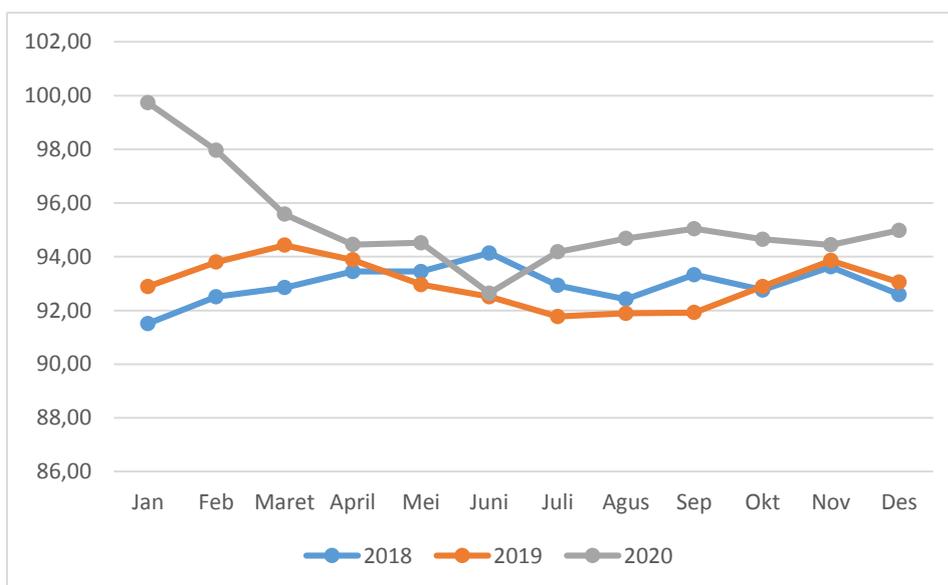
TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-2		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2019			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
92,96	92,99	99,50	95,24	95,72	2,36	103,00	92,46

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2020 mencapai sebesar 95,24 atau sebesar 95,72 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2020 baru mencapai sebesar 92,46 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya 92,99 hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,25 persen. Belum tercapainya target NTPi tahun 2020 disebabkan karena pandemi covid-19 hampir sepanjang tahun yang mengakibatkan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan indeks bayar konsumsi rumah tangga meningkat. Selain itu, juga dipicu oleh peningkatan harga biaya produksi budidaya seperti pakan dan obat-obatan.

GAMBAR 3.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2018-2020



Selama tahun 2020, NTPi mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Januari 2020 dengan nilai mencapai 99,73.

Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 92,64. Nilai Tukar Pembudiaya Ikan (NTPi) selama tiga tahun terakhir (2018 s.d 2020) menunjukkan realisasi yang relatif meningkat dengan tren sebagai berikut dari

tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,02%, dan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,25%.

Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi.

GAMBAR 3.4. BANTUAN BIOFLOK, BENIH DAN PAKAN PADA PROGRAM BUDIDAYA TAHUN 2020



Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (a) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji lab, penyediaan mesin pellet, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (b) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (c) penyediaan benih unggul.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan

IKU 3. Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Meningkatnya produksi ikan Aceh telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi daerah. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). DKP Aceh dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada anak-anak dan ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 3.4. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan					
IKU-3		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
57,89	58,97	55,28	59,32	107,31	0,59	58,64	101,16

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2020 adalah 59,32 kg/kapita/tahun, atau naik 0,59% dibandingkan dengan capaian tahun 2019, yang besarnya 58,97 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2020 telah memenuhi target sebesar 55,28 kg/kapita/tahun atau mencapai 107,31% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita/tahun, maka capaian tahun 2020 telah melampaui target yaitu 101,16% dari target akhir periode lima tahun. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam Provinsi Aceh. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung meningkatkan konsumsi ikan di Aceh antara lain :

- Penguatan melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga;
- Promosi melalui bazar produk perikanan setiap bulan dan lomba memasak menu ikan;
- Pengadaan peralatan sarana pengolahan bagi UPI dan pembangunan sentra kuliner di daerah potensial;
- Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- Kegiatan Sistem Logistik Ikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita daerah adalah :

- Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah;

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan;
- Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah;
- Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas;
- Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

GAMBAR 3.5. KEGIATAN GEMARIKAN DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI IKAN DI ACEH



C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh

IKU 4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDRB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDRB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDRB sub perikanan tahun 2020 adalah sebesar 5,25% atau meningkat 0,03% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2019 yang besarnya 5,22% dan kenaikan rata-rata per tahun 2018-2020 sebesar 8,27%. Realisasi pertumbuhan PDRB sub Perikanan tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 5,13% atau tercapai 102,34% dari target. Apabila dibandingkan dengan target renstra DKP Aceh tahun 2022 sebesar 5,32%, maka pencapaian baru mencapai 98,68%.

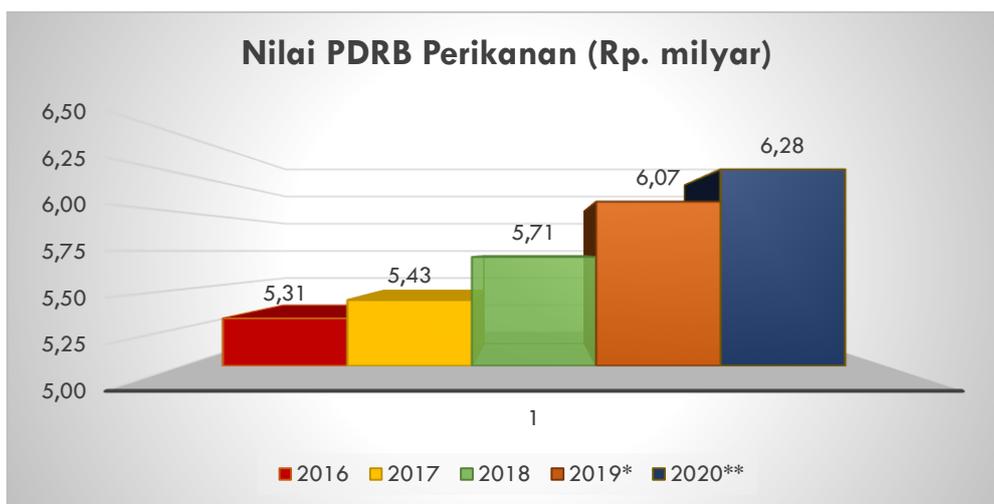
TABEL 3.5. CAPAIAN PERTUMBUHAN PDRB SUBSEKTOR PERIKANAN TAHUN 2018-2020

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh					
IKU-1		Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh					
REALISASI 2018	REALISASI 2019*	2020**			% KENAIKAN 2018-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
4,83	5,22	5,13	5,25	102,34	8,27	5,32	98,68

Sumber : BPS Aceh, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * data sementara ** data sangat sementara

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDRB antara lain: (1) meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan, (2) meningkatkan produksi perikanan tangkap dengan meningkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, (3) meningkatkan promosi investasi dibidang kelautan dan perikanan dengan melakukan kerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh serta melakukan bisnis forum dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (4) Mendorong sinergi kebijakan dan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan usaha kelautan dan perikanan baik skala UMKM maupun skala menengah dan besar.

GAMBAR 3.6. TREND NILAI PDRB PERIKANAN ADHK TAHUN 2016-2020 (Rp. milyar)



Ket : BPS Aceh 2020 (diolah DKP), * = Angka sementara, **= Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perikanan atas dasar harga konstan (ADHK), maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.5,31 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,28 milyar pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penambahan investasi dan peningkatan penyaluran bantuan permodalan di masyarakat. Selain itu, Besarnya kontribusi sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari faktor produksi perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

D. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

IKU 5. Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

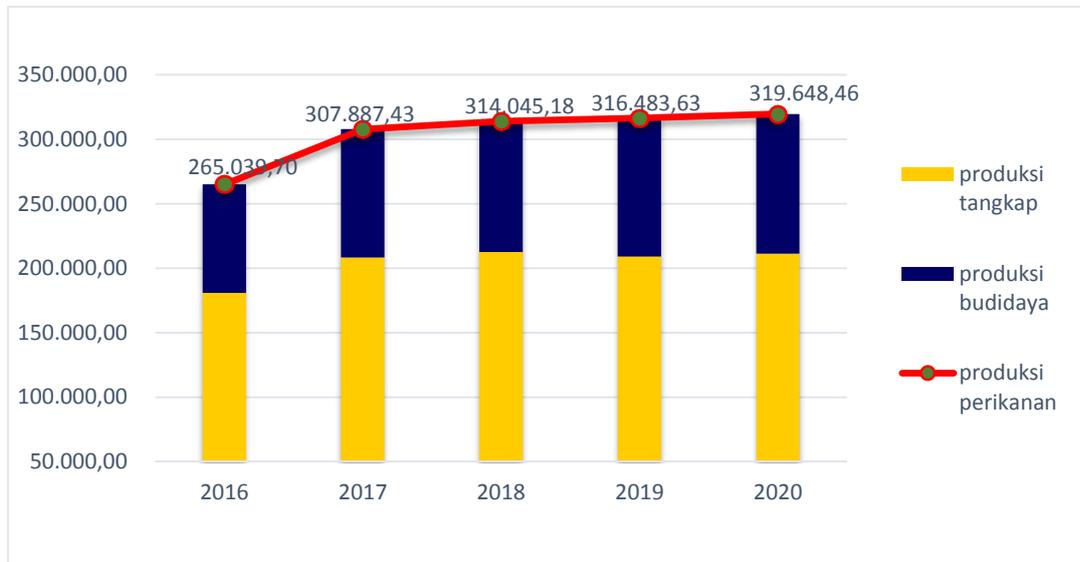
TABEL 3.6. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2019-2020

Sasaran Strategis-3		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan					
IKU-4		Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
314.045,18	316.483,63	332.608,15	319.648,46	96,10	0,99	370.250,00	86,33

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * data sementara

Produksi perikanan tahun 2020 ditargetkan 332.608,15 ton, dan realisasinya sebesar 319.648,46 ton atau mencapai 96,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 316.483,63 ton, realisasi tahun 2020 telah mengalami pertumbuhan sebesar 0,99%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2018-2022 yaitu sebesar 370.250 ton, realisasi tahun 2020 telah mencapai 86.33%.

GAMBAR 3.7. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2016-2020



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh DKP Aceh selama tahun 2020.

Produksi perikanan Aceh tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,99 persen dibandingkan tahun 2019, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap 66,09 persen dan produksi perikanan budidaya sebesar 33,91 persen.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2020 adalah sebanyak 211.266,13 ton atau mencapai 98,56% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 214.350,10 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 204.921,93 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau 6.344,20 ton berasal dari tangkapan Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 3.7. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
208.515,61	209.174,39	214.350,10	211.266,13	98,56	0,82	231.568,00	91,23

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan periode yang sama sebesar 0,82%, yaitu sebesar 208.515,61 ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 211.266,13 ton pada tahun 2020. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 0,98%. Sedangkan Capaian 2020 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka telah tercapai sebesar 91,23%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar.

Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah : Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan, perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik, bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat

tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal di 18 Kab./Kota yang telah disalurkan ditahun 2020, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka peningkatkan produksi perikanan tangkap.

TABEL 3.8. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2020 MENURUT KOMODITAS IKAN UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
I	Perikanan tangkap	180.872,60	208.348,64	208.515,61	209.174,39	211.266,13	15,84
A	Perikanan Tangkap laut	176.376,91	202.316,13	202.125,48	202.899,15	204.921,93	15,24
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	101.971,24	110.676,23	107.472,69	110.869,35	111.978,05	9,05
2	Kakap	17.427,61	20.588,42	20.855,87	20.625,58	21.391,61	19,26
3	Kembung	6.571,17	8.733,68	9.023,53	8.821,34	9.517,14	35,96
4	Tenggiri	7.329,88	9.589,74	9.674,84	9.655,25	9.751,80	31,77
5	Selar	15.690,05	18.712,50	19.838,41	18.227,88	19.655,76	19,12
6	Rajungan dan Kepiting	8.671,72	8.988,46	8.815,76	9.444,13	9.538,57	9,11
7	Lobster	4.482,31	4.481,53	4.790,61	4.475,94	4.520,70	0,56
8	Ikan Lainnya	14.232,93	20.545,57	21.653,77	20.779,68	18.568,30	43,05
B	Perikanan Tangkap PUD	4.495,69	6.032,51	6.390,13	6.275,24	6.344,20	38,59
1	Ikan	3.074,59	4.302,78	4.653,86	4.531,37	4.172,20	43,49
2	Udang	1.415,22	1.720,41	1.726,75	1.734,14	2.161,36	28,52
3	Lainnya	5,88	9,32	9,52	9,73	10,64	65,19

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh) Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 111.978,05 ton, kakap mencapai 21.391,61 ton, kembung mencapai 9.517,14 ton, tenggiri mencapai 9.751,80 ton, selar mencapai 19.655,76 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.538,57 ton, lobster mencapai 4.520,70 ton dan komoditas ikan lainnya mencapai 18.568,30 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.172,20 ton, udang 2.161,36 ton, dan jenis lainnya mencapai 10,64 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2020.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yakni sebesar 118.258,05 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 91,65%. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 meningkat sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 107.309,24 ton dan kenaikan 6,32% dari tahun 2018.

TABEL 3.9. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2020
101.529,57	107.309,24	118.258,05	108.382,33	91,65	6,19	138.682,00	78,15

Keterangan : * Angka sementara

Jika dilihat selama periode 2018-2020, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 6,19 persen per tahun dari 101.529,57 ton di tahun 2018 menjadi 108.382,33 ton di tahun 2020*). Sedangkan realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 108.382,33 ton atau mencapai 78,15% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

**TABEL 3.10. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2020
MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)**

NO	Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata/Tahun(%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Perikanan Budidaya	84.167,10	99.538,79	101.529,57	107.309,24	108.382,33	26,21
1	Bandeng	13.978,58	14.320,20	14.446,90	16.101,71	16.262,73	15,03
2	Belanak	1.277,43	1.597,69	1.662,11	2.112,47	2.133,60	56,45
3	Mas	7.096,44	8.585,54	8.572,42	9.096,21	9.187,17	27,19
4	Lele	15.742,17	18.640,89	18.655,77	19.598,21	19.794,19	23,80
5	Patin	377,78	401,21	455,98	480,82	485,63	25,55
6	Nila	11.123,07	12.700,65	13.155,70	13.590,24	13.726,14	21,32
7	Kerapu	1.862,82	2.023,23	2.166,25	2.415,51	2.439,67	27,44
8	Udang	31.330,56	39.802,72	40.871,63	42.239,06	42.661,45	33,32
9	Ikan Lainnya	1.378,25	1.466,66	1.542,81	1.675,00	1.691,75	20,42

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh)

Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2020 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang yang merupakan produksi tertinggi mencapai 42.661,45 ton, kemudian diikuti oleh ikan lele mencapai 19.794,19 ton, bandeng mencapai 16.262,73 ton, nila mencapai 13.726,14 ton, mas mencapai 9.187,17 ton, kerapu mencapai 2.439,67 ton, belanak mencapai 2.133,60 ton, patin mencapai 485,63 ton dan ikan lainnya mencapai 1.691,75 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 26,21%.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi dan pengaruh utama tidak tercapainya produksi karena wabah covid-19 yang menyebabkan banyak petani tambak menghentikan usahanya yang disebabkan meningkatnya harga bahan produksi yang beriringan dengan menurunnya harga jual hasil produksi sehingga banyak petani mengalami rugi.

Peningkatan volume produksi perikanan budidaya tahun 2020 secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;
- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang dan bandeng. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya.

IKU 6. Produksi Garam

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam daerah sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam daerah karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman.

Produksi Garam merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGAR di 2 Kabupaten (Pidie Jaya dan Aceh Utara),

produksi garam rakyat non PUGAR di 6 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar 25.542,32 ton, lebih besar dari target tahun 2019 sebesar 4.534 ton. Metodologi pendataan garam disusun oleh DKP sedangkan pengumpulan dan validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait.

TABEL 3.11. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2018-2020 (TON)

REALISASI		TAHUN 2020*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENINGKATAN 2019-2020	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
17.721,50	17.773,68	25.542,32	19.187,58	75,12	7,96	43.166,52	44,45

Keterangan : * Angka sementara

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, produksi garam mencapai 19.187,58 ton. Target produksi garam pada tahun 2020 hanya tercapai sebesar 19.187,58 ton atau mencapai 75.12%. Realisasi produksi garam di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,96% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2019 yaitu sebesar 17.773,68 ton atau 7,96%. Apabila dibandingkan dengan target 2022 (Renstra DKP Aceh Tahun 2017-2022), realisasi tahun 2020 mencapai sebesar 44,45%. Diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target produksi sebesar 33.205,02 ton di tahun 2021. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2020 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan. Berikut rincian distribusi jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

Target 25,542,32 ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Jumlah produksi garam tahun 2020 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program

nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam.

TABEL 3.12. PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)*	
		2019	2020
1	Aceh Selatan	19,45	15,97
2	Aceh Barat Daya	47,32	45,42
3	Aceh Besar	1.399,75	1.611,44
4	Pidie	7.814,00	8.256,45
5	Pidie Jaya	1.160,19	1.470,20
6	Bireuen	3.259,72	3.320,77
7	Aceh Utara	3.005,35	3.210,07
8	Aceh Timur	1.067,90	1.257,27
TOTAL PRODUKSI		17.773,68	19.187,58

Keterangan : * Angka sementara

Pada tahun 2020 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Pidie sebesar 8.256,45 ton, kemudian diikuti Kabupaten Bireuen sebesar 3.320,77 ton, Aceh Utara sebesar 3.210,07 ton, Aceh Besar 1.611,44 ton, Pidie Jaya 1.470,20, Aceh Timur sebesar 1.257,27 ton, Aceh Barat Daya sebesar 45,42 ton dan Aceh Selatan sebesar 15,97 ton.

Meskipun produksi garam telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disisi lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di delapan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2020, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Implementasi Manajemen Stok belum berjalan dengan baik.

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBA agar

produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya). Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat memproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.

Capaian produksi garam tahun 2020 didukung oleh kegiatan :

- Integrasi lahan garam di 2 kabupaten melalui program bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

GAMBAR 3.8. PELAKSANAAN INTEGRASI LAHAN GARAM DI TAHUN 2020



E. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Selama dua tahun yaitu tahun 2019-2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).

IKU 7. Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.13. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2020

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
IKU-7		Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			TARGET AKHIR RENSTRA	(% CAPAIAN 2018-2022)
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
4.408.162,00	2.986.439,00	1.357.000,00	1.837.400,00	135,40	4.552.000,00	40,36

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Pada tahun 2020, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 1,8 juta USD atau telah mencapai 135,4% dari target tahun 2020 yaitu sebesar 1,3 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 2,9 juta USD, capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 38,47%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2017-2022 yaitu sebesar 4,5 juta USD, realisasi tahun 2020 baru mencapai 40,36%. Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target ekspor di tahun 2021.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 0,9 juta (52,22%), udang dan kepiting mencapai 0,7 juta USD (40,04%), kerapu sebesar 0,1 juta USD (6,09%), dan lobster sebesar 30 ribu USD (1,65%).

Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2020 dikarenakan terjadi wabah covid-19, yang menyebabkan banyak terjadi penurunan harga dari komoditas utama seperti ikan tuna dan cakalang, sehingga mempengaruhi nilai ekspor perikanan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Negara pengimpor produk perikanan seperti Singapura, China dan Jepang semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan non-IUU, sustainability dan traceability;
- Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang;
- Potensi diversifikasi tujuan pasar baru seperti Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, lobster dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan pemantauan pasar;
- Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan.

F. Sasaran Strategis 5 : Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran strategis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam

batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).

IKU 8. Luas Kawasan Konservasi Perairan Ekspor Perikanan

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2020. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan tahun 2020. Realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2020 yaitu seluas 161.772,35 ha atau sebesar 57,78 % dari target 280.000 ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel

TABEL 3.14. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-8		Luas kawasan konservasi perairan (ha)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
149.228,57	150.331,32	280.000,00	161.772,35	57,78	7,07	281.100,00	57,55

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Luas kawasan 161.772,35 ha tersebut terdiri dari 27 kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.15. LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAWASAN	LUAS (Ha)
1	Aceh Besar	8	29.615,21
2	Aceh Jaya*	2	43.398,43
3	Aceh Barat Daya	6	16.017,05
4	Aceh Selatan	5	3.590,34
5	Simeulue*	4	66.354,11
6	Aceh Tamiang	2	2.797,21

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Realisasi tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019: tahun 2020 berarti telah menambah kawasan konservasi seluas 11.441,03 hektar dari luas kawasan konservasi tahun 2019 yaitu 150.331,32 hektar, dan jika disandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2019 sebesar 1.102,75 hektar capaian luasan jauh lebih besar. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2020 mencapai 57,55%.

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terjadi perubahan anggaran pada tahun 2020 yang dialihkan untuk penanganan wabah covid-19 sehingga banyak calon kawasan konservasi tidak dapat ditetapkan. Selain itu, terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2020.

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2021, yaitu identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait.

Kegiatan pendukung pencapaian target 2020 adalah Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase tangkapan ikan yang masih aman di bawah angka Maximum Sustainable Yield (MSY) Aceh yaitu 272.707 ton.

TABEL 3.16. PROPORSI TANGKAPAN IKAN SELAMA 2017-2020 TERHADAP MSY (%)

TAHUN	2017	2018	2019	2020
Produksi Tangkap (ton)	208.349	208.516	209.174	211.266
% terhadap MSY Aceh	76,40	76,46	76,70	77,47

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2020 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 211.266 ton atau 77,47% dari angka MSY Aceh, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dikategorikan aman, namun dilihat dalam tiga tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami peningkatan dari angka 76,40% pada tahun 2017 menjadi 77,47% pada tahun 2020.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bantuan penggantian alat tangkap, peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di 18 Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua upaya yang merusak lingkungan laut, sehingga diharapkan dapat terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan Aceh (WPP 571 dan WPP 572). Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan

untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 3.17. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-9		Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020*			% Kenaikan 2019-2020	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
2,64	2,66	4,95	2,86	57,78	7,07	4,97	57,55

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,86% atau 161.772,35 ha dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan belum melampaui terget tahun 2020 sebesar 4,95% atau 57,78%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, luas kawasan konservasi perairan meningkat sebesar 11.441,03 ha atau sebesar 7,07%.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove dikawasan konservasi bentuk wujud dari rehabilitasi kawasan konservasi.

3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh

Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DKP Aceh kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada tahun 2020, Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan sebesar 90,00%/kategori baik, dan telah terealisasi sebesar 87,40%/kategori cukup atau 97,11% dari

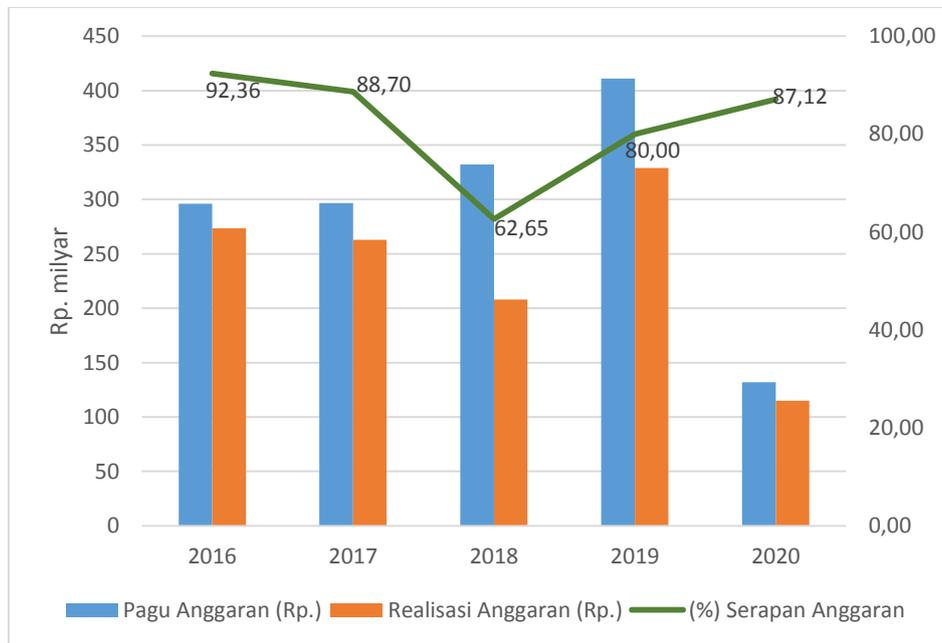
target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 79,91%, realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,57%.

TABEL 3.18. CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN DKP ACEH TAHUN 2020

KINERJA ANGGARAN					
REALISASI 2018	REALISASI 2019	2020			% KENAIKAN 2019-2020
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
62,67	79,91	90,00	87,40	97,11	8,57

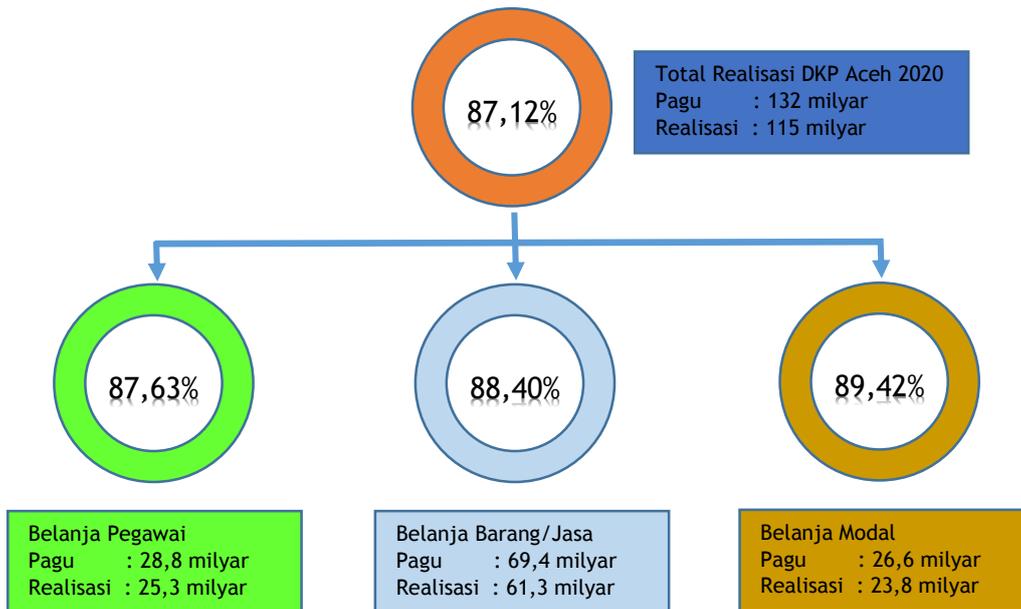
APBA DKP tahun 2016 sampai 2020 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon III lingkup DKP Aceh, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Alokasi anggaran tahun 2020 digunakan untuk pembiayaan rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran) sebesar 21,88%, belanja untuk stakeholder langsung sebesar 78,12%. Perkembangan pagu dan realisasi DKP sebagaimana tabel berikut.

GAMBAR 3.9. GRAFIK PAGU, REALISASI DAN SERAPAN ANGGARAN APBA DKP ACEH TAHUN 2016-2020



Serapan APBA DKP tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif, namun menunjukkan kinerja yang positif dari tahun 2016 s.d 2020 yaitu pada tahun 2016 mencapai 92,36% dan tahun 2020 mencapai 87,12%.

GAMBAR 3.10. REALISASI APBA DKP ACEH TAHUN 2020 PER JENIS BELANJA



Realisasi anggaran tahun 2020, yang mencapai 87,12%, dengan rincian realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 25,3 milyar atau mencapai 87,63%, belanja barang/jasa sebesar Rp. 69,4 milyar atau mencapai 88,40% dan Belanja modal sebesar 26,6 milyar atau telah mencapai 89,42%.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 diantaranya :

1. Proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi banyaknya gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak;
2. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur dan perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2020;
3. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, cuaca buruk;
4. Adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan oleh beberapa unit eselon III lingkup DKP Aceh;
5. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, namun belum diusulkan penyelesaian tagihannya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya:

1. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan “**Aceh Hebat**” yang tercantum dalam dokumen RPJMA;
3. Meminta kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
4. Seluruh kegiatan pada Eselon III lingkup DKP Aceh dapat dilakukan pemantauan oleh Tim Monev untuk pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masing;
5. Memastikan seluruh pekerjaan dibayar sesuai dengan penyelesaian fisiknya.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu mengantisipasi perubahan di tahun 2021 yang berpotensi mempengaruhi capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.

Sepanjang tahun 2020, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2021 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata

Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2020 sebesar 98,32%. Dari 6 Sasaran Strategis, terdapat tiga Sasaran Strategis yang nilainya di atas 100% dan tiga Sasaran Strategis masih di bawah 100%. Adapun sasaran strategis yang nilainya di atas 100% adalah Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan (107,31%), meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh (102,34%) dan meningkatkan neraca perdagangan perikanan (135,40%). Sedangkan, yang nilainya di bawah 100% yaitu Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan (98,28%), Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan (95,11%) dan Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir (57,78%).

Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengelola anggaran sebesar Rp. 132.029.875.256,- atau terdapat pengurangan sebesar Rp. 164.821.392.574,- apabila dibandingkan dengan DPA awal DKP Aceh yaitu sebesar Rp. 296.851.267.830,- yang terbagi menjadi 11 program pembangunan. Sampai dengan Desember 2020 realisasi anggaran mencapai Rp. 115.389.806.196,- atau 87,40%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah. Untuk itu, rencana aksi/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah :

- A. Untuk Bantuan Pemerintah DKP Aceh kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk pencapaian pendapatan pembudidaya ikan yang masih rendah, sehingga diharapkan di tahun 2021 mengalami peningkatan pada nilai capaian NTPi yang masih rendah.
- B. Dalam rangka mendukung sasaran strategis, meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, perlu adanya pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan. Sedangkan pada penangkapan ikan perlu ditingkatkan bantuan

boat/perahu dan alat bantu penangkapan, yang pada tahun 2020 banyak kegiatan ini yang tidak terealisasi oleh bermacam faktor.

- C. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan mutu hasil perikanan, ikut partisipasi dalam pameran produk perikanan nasional maupun internasional dan akses permodalan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Aceh.
- D. Identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. ILYAS, M.P
 Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T
 Jabatan : Plt. Gubernur Aceh

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

Banda Aceh, 2020



Dr. Ir. ILYAS, M.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101,25 99,50
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	55,28
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,13
4.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	5. Produksi Perikanan (ton) a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 6. Produksi Garam (ton)	332.628,15 214.350,10 118.258,05 25.542,32
5.	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	7. Nilai Ekspor Perikanan (US\$)	1.357.000
6.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	8. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	280.000,00

Program	Anggaran
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 52.399.505.544
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 34.366.069.935
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 740.183.000
4. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan	Rp 623.866.770
5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp 2.024.063.021



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

Banda Aceh, 2020



Dr. Ir. ILYAS, M.P

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,90	101,25	97,48	96,28	106,00	91,96
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	92,99	99,50	95,24	95,72	103,00	92,46
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,97	55,28	59,32 *	107,31	58,64	101,16
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan Aceh	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Aceh (%)	5,22	5,13	5,25 **	102,34	4,98	105,42
4	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi Perikanan (ton)	316.483,63	332.608,15	319.648,46 *	96,10	370.250,00	86,33
		- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	209.174,39	214.350,10	211.266,13 *	98,56	231.568,00	91,23
		- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	107.309,24	118.258,05	108.382,33 *	91,65	138.682,00	78,15
		Produksi Garam (ton)	14.591,00	25.542,32	19.187,58 *	75,12	43.166,52	44,45
5	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	2.986.439,00	1.357.000,00	1.837.400,00 **	135,40	1.552.000,00	118,39
6	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	150.331,32	280.000,00	161.772,35 **	57,78	281.100,00	57,55
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	76,70	69,67	77,47	111,20	84,34	91,85
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,66	4,95	2,86	57,78	4,97	57,55

3. Penghargaan

-